

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan disusun dengan merangkum temuan penelitian pada bab sebelumnya dan menegaskan hal hal yang paling menonjol dari proses pelaksanaan program, pengalaman pekerja sektor informal, serta dinamika penyelenggaraan layanan di tingkat pelaksana.

1) Kesimpulan Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Sektor Informal di Kota Yogyakarta

Implementasi program telah berjalan dan memperlihatkan upaya adaptasi pelaksana untuk menjangkau karakter pekerja sektor informal yang tidak homogen. Pelaksanaan program tidak hanya mengandalkan pelayanan di kantor, tetapi juga memanfaatkan layanan digital, kegiatan jemput bola, serta kemitraan dengan komunitas dan pihak pihak yang memiliki kedekatan dengan pekerja. Pola ini membantu memperluas akses pendaftaran dan mempercepat proses awal kepesertaan, sehingga pekerja dapat menjadi peserta dengan persyaratan yang relatif mudah dan waktu layanan yang lebih efisien ketika proses berjalan normal. Keberhasilan implementasi belum hanya ditentukan oleh tersedianya kanal layanan, namun sangat dipengaruhi oleh seberapa jauh isi kebijakan dipahami dan dirasakan manfaatnya oleh pekerja sektor informal. Manfaat perlindungan yang bersifat langsung seperti perlindungan kecelakaan kerja dan perlindungan kematian cenderung lebih mudah diterima, sedangkan manfaat yang bersifat jangka panjang lebih sering dipahami sebagai simpanan

yang bisa dikalahkan oleh kebutuhan harian. Kondisi ini membuat keberlanjutan kepesertaan menjadi aspek yang paling rentan, karena perubahan perilaku yang diharapkan kebijakan, yaitu kesadaran risiko dan kedisiplinan membayar iuran, masih bergantung pada stabilitas pendapatan, pengalaman layanan, serta tingkat kepercayaan peserta terhadap kemudahan akses manfaat saat dibutuhkan.

2) Kesimpulan Faktor Faktor Penghambat Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Sektor Informal di Kota Yogyakarta

Penghambat implementasi paling terlihat pada aspek komunikasi dan pemahaman peserta. Penyampaian informasi program memang tersedia melalui berbagai saluran, namun jangkauannya belum merata dan tidak selalu menggunakan bahasa yang dekat dengan keseharian pekerja sektor informal. Ketika informasi yang diterima bersifat terlalu teknis atau tidak konsisten antar saluran, pekerja menjadi ragu, menunda pendaftaran, atau tidak tuntas memahami konsekuensi kepesertaan tidak aktif. Hambatan komunikasi juga berpengaruh pada keputusan pekerja dalam menjaga kepesertaan, karena sebagian peserta lebih banyak mengandalkan informasi dari lingkungan kerja atau komunitas dibanding dari lembaga pelaksana secara langsung. Hambatan pada sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi saling terkait dan berpengaruh pada pengalaman layanan lanjutan. Dari sisi sumber daya, keterbatasan utama berada pada waktu dan kemampuan ekonomi pekerja sektor informal untuk mengikuti prosedur layanan yang tidak selalu dapat selesai dalam satu kunjungan, serta pada ketergantungan terhadap layanan digital yang

kadang mengalami kendala teknis. Dari sisi disposisi pelaksana, variasi respons layanan, kecepatan tindak lanjut, dan kualitas penjelasan petugas dapat memperkuat atau melemahkan kepercayaan peserta. Sementara itu, struktur birokrasi masih menimbulkan hambatan ketika peserta menghadapi urusan koreksi data, penonaktifan, aktivasi ulang, dan klaim, terutama saat prosedur membutuhkan persetujuan berjenjang, koordinasi antar unit, atau keterikatan pada kantor cabang asal yang membuat layanan kurang fleksibel bagi pekerja yang mobilitasnya tinggi.

4.2 Saran

Saran pada bagian ini disusun untuk memperkuat implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja sektor informal di Kota Yogyakarta, sekaligus menekan faktor faktor penghambat yang ditemukan dalam penelitian. Saran diberikan bagi lembaga pelaksana, mitra kerja sama, serta pihak pihak yang berperan dalam perluasan kepesertaan dan penguatan layanan, dengan menekankan perbaikan yang realistis dan sejalan dengan kebutuhan pekerja sektor informal.

1) Saran Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Sektor Informal di Kota Yogyakarta

Pelaksana program perlu memperkuat strategi edukasi manfaat dan pengelolaan persepsi peserta, terutama untuk pekerja sektor informal yang masih memandang iuran sebagai beban rutin dan belum melihat manfaat sebagai perlindungan risiko kerja. Edukasi sebaiknya disusun dengan bahasa yang sederhana, menggunakan contoh yang dekat dengan situasi pekerjaan harian,

serta menonjolkan manfaat yang relevan dengan risiko yang mungkin dialami pekerja. Materi edukasi dapat dipaketkan dalam format singkat yang mudah dibagikan oleh komunitas atau mitra, sehingga pesan program tidak hanya berhenti pada pendaftaran, tetapi berlanjut pada pemahaman cara menjaga kepesertaan aktif dan cara mengakses manfaat secara tepat. Selain itu, pelaksana perlu meningkatkan pendekatan layanan yang menyesuaikan keterbatasan waktu pekerja sektor informal. Penguatan layanan jemput bola dapat diarahkan pada lokasi lokasi kerja atau titik kumpul yang rutin, sehingga pekerja tidak perlu mengorbankan jam kerja untuk mengurus pendaftaran atau konsultasi. Selain itu, kanal digital perlu diperkuat bukan hanya sebagai sarana pendaftaran, tetapi juga sebagai sarana pendampingan yang benar benar membantu, misalnya melalui panduan langkah demi langkah yang ringkas, notifikasi yang jelas mengenai status proses, serta fitur yang memudahkan peserta memahami kewajiban iuran dan status kepesertaan. Upaya ini akan membantu memastikan program tidak berhenti pada tahap pendaftaran awal, tetapi mampu mempertahankan keberlanjutan kepesertaan sebagai tujuan implementasi.

2) Saran Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Sektor Informal di Kota Yogyakarta

Pertama, untuk mengatasi hambatan komunikasi, pelaksana program perlu menstandarkan pesan layanan dan memastikan konsistensi informasi antar kanal, baik kantor layanan, kanal digital, maupun saluran bantuan. Standarisasi dapat dilakukan melalui pedoman informasi yang ringkas dan mudah diakses,

pelatihan komunikasi layanan bagi petugas, serta penyederhanaan istilah administratif yang sering membingungkan peserta. Pelaksana juga dapat memperkuat peran mitra komunitas sebagai perpanjangan informasi dengan menyediakan materi resmi yang mudah dipahami, sehingga pekerja tidak hanya menerima informasi dari cerita antar pekerja yang berisiko tidak lengkap.

Kedua, untuk mengatasi hambatan sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi, diperlukan perbaikan pada alur layanan lanjutan agar lebih cepat, transparan, dan fleksibel bagi mobilitas pekerja sektor informal. Pelaksana perlu memperkuat mekanisme koreksi data, penonaktifan, aktivasi ulang, serta klaim dengan memperjelas tahapan proses dan estimasi waktu penyelesaian, sehingga peserta memperoleh kepastian dan tidak merasa proses berhenti tanpa kabar. Jika terdapat kebutuhan persetujuan internal, status persetujuan sebaiknya dapat dipantau peserta melalui kanal digital atau pemberitahuan sederhana. Selain itu, fleksibilitas lintas kantor cabang perlu diperluas agar peserta yang berpindah domisili tetap dapat menyelesaikan urusan layanan tanpa harus kembali ke cabang asal. Perbaikan ini akan menekan fragmentasi layanan dan pada saat yang sama memperkuat pengalaman pelayanan, sehingga kepercayaan peserta meningkat dan peluang kepesertaan tetap aktif menjadi lebih besar.